



Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong *Tahun* **2020**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

2020



KATA PENGANTAR

Segala bagi puji Allah SWT yang memberikan rahmatNYA sehingga bisa terselesaikannya Laporan Kinerja UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap pelaksanaan APBN tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan gambaran tentang pencapaian dari target indikator kinerja utama UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Selain itu juga sebagai pertanggungjawaban terhadap stakeholder yang ada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan, sehingga diperlukan saran penyempurnaan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi pengembangan perikanan berbasis kinerja dimasa mendatang.

Lamongan, 19 Januari 2021

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Brondong

Ibrabim, A.Pt, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 merupakan laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis *balance scorecard* (BSC) terhadap rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2020. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara periodik melalui serangkaian program dan kegiatan tahunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Tangkap serta memperhatikan program unit eselon I lainnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dengan mempertimbangkan peluang, potensi, permasalahan dan kewenangan yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Capaian Kinerja IKU				
TW1	TW2	TW3	TW4	
108,74 Q	110,41 Q	110,96 Q	108,67 Q	

Capaian Kinerja IKU + IK				
TW1	TW2	TW3	TW4	
108,74 Q	112,81 Q	117,72 Q	109,67 Q	

Warna	Keberangan
Baik	90-100
Cukup	70 - 89
Kurang	50 - 69
Sangat Kurang	<=49
Belum ada penilaian	
Belum input capaian	

Secara umum dapat terealisasi dengan rata-rata tingkat capaian sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 108,67%. Secara umum, beberapa capaian indikator kinerja utama tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Metode *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET 2020	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	60	60	60	100
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2	Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	700	700	1.039,19	148,46
3	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit)	80	80	209	261,25
4	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100	100	100	100
		5	Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1	1	1	100
5	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6	Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.452	47.452	55.358,89	116,66
		7	Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1	1	1	100
		8	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	80	80	85,35	106,69
		9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Orang)	20	20	20	100
		10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1	1	1	100
		11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	100	100	100	100
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	75,07	75,07	86,84	115,68
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks)	72	72	67,79	94,15



		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85	85	87,78	103,27
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	88	88	99,38	112,93





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju terCapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan



secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang disusun setiap tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Tugas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;



2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, struktur Organisasi Perikanan Nusantara Brondong terdiri atas 4 (Empat) unit kerja Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Seksi Operasional Pelabuhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis dan penerbitan CPIB.



2. Seksi Kesyahbandaran, dipimpin oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapar, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Seksi Tata Kelola dan pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana, bimbingan teknis, fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi, pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, pelayanan jasa dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.
4. Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Personil PPN Brondong

Dalam menjalankan tugasnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN Brondong) di dukung oleh 68 orang pegawai. Komposisi pegawai di PPN Brondong pada tahun 2020 berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Pegawai Di PPN Brondong Pada Tahun 2020 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV		L	P	L+P
	L	P	L	P	L	P	L	P			
PNS	-	-	13	-	23	13	1	-	37	13	50
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	-	-	15	-	3	-	-	-	18	-	18
Jumlah	1	-	28	-	26	13	1	-	55	13	68

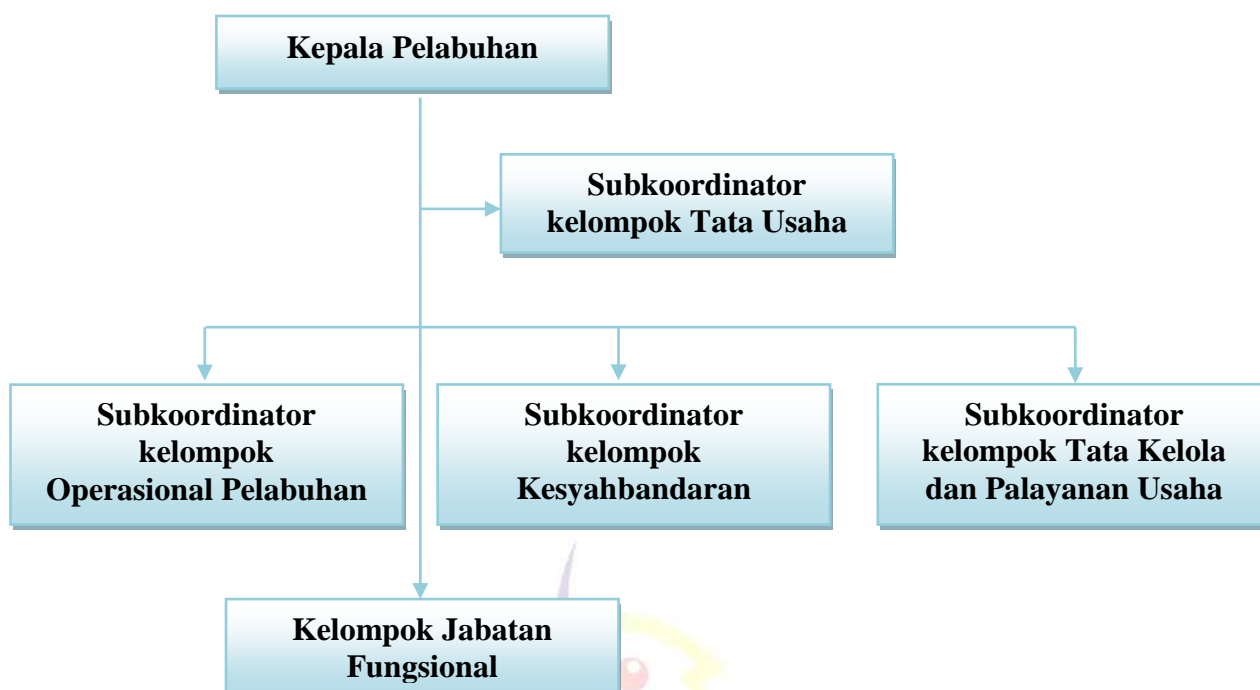
1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014, tanggal 16 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan
- d. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
- e. Kepala Seksi Kesyahbandaran
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut di atas.

V. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Stuktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selama Triwulan II Tahun 2020. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan (PK).
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi pada tahun 2020, Realisasi anggaran.
- 5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 6) **Lampiran**.
Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Adapun Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.



Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui

pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal

- perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBP SDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
- a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
 - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik



- tangkap dan laik simpan (unit);
- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
 - Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
 - Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
 - Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
 - Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
 - Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
 - Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
 - Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);

- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);
 - Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
 - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
 - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
 - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

Sasaran strategis dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

1. *Customer Perspective (Output)*

Sasaran strategis “Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja :

Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 60 nelayan.

Sasaran strategis “Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja :

Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Rp 700.

Sasaran strategis “Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja :

Jumlah produksi perikanan tangkap di UPT PPN Brondong sebesar 47.452 ton.

2. *Internal Process Perspective (process)*

Sasaran strategis “Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, dengan indikator kinerja :

- a. Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan sebesar 100 persen.
- b. Jumlah lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional sebesar 1 WPP.

Sasaran strategis “Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan sebesar 80 unit kapal.
- b. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 80 persen.
- c. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 20 orang.

- d. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 1 lokasi.
- e. Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat–daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 100 persen
- f. Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 1 lokasi.

3. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat sasaran strategis Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

dengan indikator kinerja :

- a. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 75,07.
- b. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 72.
- c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 85.
- d. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 88.

1.3. Rencana Kinerja PPN Brondong Tahun 2020

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, PPN Brondong telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2020 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target – target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2020. Hal ini ditetapkan pada setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.

Pada tahun 2020, PPN Brondong melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp **12.104.445.000,-**.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan PPN Brondong dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan. Dalam rangka mengukur realisasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2020 yang mengacu pada *Balanced Score Card (BSC)*. Adapun rencana kinerja tahunan 2020 dalam penganggaran dapat disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 sesuai dengan *Balanced Score Card (BSC)* pada Rencana Kinerja PPN Brondong Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	60
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2	Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	700
3	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit)	80
4	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100
		5	Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1
5	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6	Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.452
		7	Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1
		8	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	80
		9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	20
		10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1
11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	100		

6	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	75,07
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks)	72
		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	88

1.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya.

1.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi

yang ada. Perjanjian kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019, serta Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	60
2	Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	700
3	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit)	80
4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100
5	Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1
6	Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.452
7	Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1
8	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	80
9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	20
10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1
11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	100
12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	75,07
13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks)	72
14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85
15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	88

Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tangkap
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp.12.104.445.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja PPN Brondong merupakan kinerja kolektif dari seluruh eselon 4 yang ada di PPN Brondong. Pengukuran kinerja pelabuhan terbagi dalam 3 Perspektif, 6 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama. Empat perspektif tersebut meliputi :

1. Perspektif customer terdiri dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama.
2. Perspektif internal proses terdiri dari 2 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja utama.
3. Perspektif learning and growth terdiri dari 1 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) kinerja PPN Brondong pada tahun 2020 sebesar 109,07%.

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS) (%)
1.	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	100,00
2.	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	120,00
3.	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	120,00
4.	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	100.,00
5.	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	107,23
6.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	106,51

Tabel 6. Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Metode *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET 2020	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	60	60	60	100
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2 Nilai PNPB Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	700	700	1.015,06	145
3	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit)	80	80	209	261,25
4	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100	100	100	100
		5 Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1	1	1	100
5	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6 Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.452	47.452	55.358,89	116,66
		7 Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1	1	1	100
		8 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	80	80	85,35	106,69
		9 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Orang)	20	20	20	100
		10 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1	1	1	100

		11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	100	100	100	100
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	75,07	75,07	86,84	115,68
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks)	72	72	67,79	94,15
		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85	85	87,78	103,27
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	88	88	99,38	112,93

3.1.1. Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

IKU 1. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Indikator ini merupakan indikator yang menghitung capaian jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nelayan)	-	60	60	100

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tercapai sebanyak 60 nelayan sesuai dengan target yang ada. Pada tahun 2019, indikator ini tidak ada sebagai capaian PPN Brondong. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan). Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 1 orang.

3.1.2. Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta).

IKU 2. Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)

Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Capaian indikator nilai PNBP pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.015 juta atau sebesar 145% dari target sebesar Rp. 700 juta.

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPT PPN Brondong Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
2	Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	1.390,66	700	1.015,06	145

Tabel 8. Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPT PPN Brondong Tahun 2020

No	Bulan	Capaian (juta)
1	Januari	61,99
2	Februari	52,50
3	Maret	58,71
4	April	102,44
5	Mei	74,31
6	Juni	71,80
7	Juli	65,81
8	Agustus	77,88
9	September	94,92
10	Oktober	104,73
11	November	112,49
12	Desember	137,48
JUMLAH		1.015,06

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai PNBP hingga tahun 2020 yaitu sebanyak Rp. 1.015,06 juta dengan capaian 145% lebih tinggi dari target yang di tetapkan pada 2020. Nilai PNBP tersebut lebih rendah dibanding nilai PNBP pada tahun 2019 yaitu sebanyak Rp. 1.390,66 juta. Tingginya realisasi nilai PNBP pada ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pengguna jasa di PPDI serta upaya yang terus menerus dilakukan oleh seluruh pegawai PPN Brondong baik itu inovasi dengan sistem pembayaran PNBP non tunai maupun peningkatan fasilitas pelabuhan demi meningkatkan nilai PNBP. Indikator ini

didukung dengan kegiatan pelayan jasa tambat labuh, jasa pas masuk, jasa kebersihan, jasa listrik, jasa bengkel, sewa balai pertemuan, jasa sewa jenis-jenis alat dan pendapatan jasa lainnya. Indikator ini didukung oleh 28 pegawai seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 804.950.000,-. Namun, nilai capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 ada penyewaan alat berat berupa Kapal Keruk yang dimiliki PPN Brondong sedangkan tahun 2020 tidak ada penyewaan.

3.1.3. Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit).

IKU 3. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit)

Indikator ini merupakan indikator yang menghitung jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di PPN Brondong.

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
3	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit)	-	80	209	261,25

Tabel 9. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Kapal (unit)
1	Maret	20
2	Juni	20
3	September	20
4	Desember	149
Total		209

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tercapai sebanyak 209 unit kapal melebihi dengan target yang ada, yaitu 80 unit kapal dengan realisasi 261,25%. Pada tahun 2019, indikator ini tidak ada dalam capaian PPN Brondong. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan pengumpulan data logbook penangkapan ikan dan sosialisasi penerapan e-logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 12 orang.

3.1.4. Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) dan Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP).

IKU 4. Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan

kepulauan yang merupakan wilayah kerja operasional perlabuhan PPN Brondong.

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	-	100	100	100

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan tercapai sebanyak 100 % sesuai dengan target yang ada. Pada tahun 2019, indikator ini tidak ada sebagai capaian PPN Brondong. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka evaluasi rencana pengelolaan perikanan 712. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan inisebesar Rp. 12.348.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 2 orang.

IKU 5. Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur kesesuaian antara Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah dilakukan pengelolaan berdasarkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun dan ditetapkan untuk masing – masing Wilayah Pengelolaan Perikanan. Asumsi jumlah WPP dikelola sesuai RPP adalah: (1) Jumlah RPP yang telah ditetapkan melalui Peraturan atau Menteri Kelautan dan Perikanan serta (2) Persentase rencana aksi yang telah diimplementasikan sesuai dengan dokumen RPP WPPNRI lebih dari 75 % (>75%).

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
5	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1	1	1	100

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP) tercapai sebanyak 1 WPP sesuai dengan target yang ada. Pada tahun 2019, indikator ini juga tercapai sebanyak 1 WPP. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan pengumpulan data dan informasi pemanfaatan sumber daya perikanan serta operasional sekretariat regional lembaga pengelola perikanan WPPNRI 712. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan inisebesar Rp. 30.000.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 1 orang.

3.1.5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdayasaing, dan berkelanjutan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator yakni :

- 1) Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)
- 2) Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)
- 3) Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)
- 4) Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)
- 5) Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)

- 6) Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)

IKU 6. Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)

Indikator kinerja utama jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Brondong merupakan hasil perhitungan dari jumlah produksi yang didaratkan di PPN Brondong. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap bulan. Capaian sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 61.478,23 ton atau 129,56% dari target sebesar 47.452 ton. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Brondong setiap bulannya sebagai berikut :

Tabel 9. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PPN Brondong Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Produksi (ton)
1	Januari	4.215,75
2	Februari	4.924,74
3	Maret	5.115,30
4	April	4.980,51
5	Mei	2.961,20
6	Juni	3.544,01
7	Juli	5.335,07
8	Agustus	5.239,42
9	September	6.429,39
10	Oktober	7.470,71
11	November	3.832,64
12	Desember	1.310,16
Total		55.358,89

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Brondong	61.223,25	47.452	55.358,89	116,66



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah produksi ikan hingga tahun 2020 adalah sebanyak 55.358,89 ton ikan atau sebanyak 116,66% dari target yang ditetapkan yaitu 47.452 ton ikan. Jumlah produksi perikanan tangkap hingga tahun 2020 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 61.223,25 ton ikan. Menurunnya jumlah produksi ikan pada tahun 2020 dibandingkan jumlah produksi ikan pada triwulan II tahun 2019 disebabkan oleh kondisi perairan di pantai utara (WPP 712) yang kurang kondusif untuk nelayan menangkap ikan di laut. Tindakan yang dilakukan demi mendukung pencapaian target IKU jumlah produksi perikanan tangkap yaitu dengan melakukan pendataan jumlah produksi dari kapal yang bongkar. Kegiatan ini didukung oleh 3 pegawai pelabuhan dengan tidak menggunakan anggaran pelabuhan.

IKU 7. Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur pelaksanaan Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi).

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	1	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 PPN Brondong melakukan pengembangan fasilitas ada 2 unit dengan jalan membangun:

- a. Pembangunan kanopi di tempat pelayanan jasa pas masuk (gerbang masuk PPN Brondong)

Pelaksanaan pembangunan Kanopi dimulai pada 30 Maret 2020 sampai dengan 6 April 2020, dimaksudkan agar petugas yang melakukan pelayanan

jasa pas masuk kepada pengguna jasa di PPN Brondong dapat lebih intensif lagi terutama ketika kondisi hujan maupun panas terik. Nilai anggarannya adalah sebesar Rp. 20.000.000,-.

b. Pembangunan instalasi air laut bersih

Pelaksanaan pembangunan instalasi air laut bersih dimulai pada 23 juni 2020 sampai dengan 22 Juli 2020, ini dimaksudkan untuk menyediakan air laut bersih bagi supplier ikan yang sebagian besar sudah membangun outlet pengepakan ikan di area PPN Brondong. Nilai anggarannya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- Total anggaran pengembangan fasilitas di PPN Brondong yang terealisasi di tahun 2020 adalah Rp. 220.000.000,-, yang saat ini sudah meyumbang manfaat bagi PPN Brondong dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

IKU 8. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)

Tingkat Operasional PPN Brondong yang memenuhi standar adalah ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan-kegiatan operasional UPT PPN Brondong. Kegiatan tersebut meliputi : Laporan PIPP.

Tabel 11. Data Nilai PIPP Tahun 2020

No	Bulan	Nilai PIPP
1	Januari	81,50
2	Februari	79,76
3	Maret	86,50
4	April	91,00
5	Mei	85,75
6	Juni	89,50
7	Juli	90,75
8	Agustus	87,00
9	September	90,75
10	Oktober	82,5
11	November	85,00
12	Desember	74,25
	Rata-Rata	85,35

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Tingkat Operasional di UPT Yang Memenuhi Standar Tahun 2020

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	
				Capaian Kinerja	(%)
8	Tingkat operasional pelabuhan perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85,69	80	85,35	106,69

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai PIPP hingga tahun 2020 adalah sebesar 85,35 dengan capaian 106,69% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80. Capaian indikator ini di 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di 2019, yaitu sebesar 85,69. Hal ini disebabkan adanya kendala server PIPP yang terkadang bermasalah. Tindakan yang dilakukan demi mendukung pencapaian target IKU tersebut yaitu dengan menugaskan 5 orang pegawai untuk mengumpulkan dan mengentry data dukung operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP. Total anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini sebesar Rp. 13.204.000,-.

IKU 9. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)

Indikator ini merupakan indikator yang menghitung Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	0	20	20	100



Berdasarkan tabel diatas, jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi dan keterampilan adalah sebanyak 20 awak kapal. Pada tahun 2020 telah diterbitkan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) untuk awak kapal di Wilayah Kerja PPN Brondong sebanyak 20 sertifikat, dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 20 awak kapal. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 17.947.000,-. Dengan adanya awak kapal yang tersertifikasi ini harapannya dapat meningkatkan nilai tawar nelayan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan dari wilayah PPN Brondong.

IKU 10. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)

Indikator ini merupakan indikator yang menghitung jumlah Capaian kegiatan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi)	0	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas, capaian kegiatan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yaitu 100%, dengan realisasi 1 dari yang ditargetkan sebanyak 1. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan 3 orang pegawai dari Seksi Kesyahbandaran. TerCapainya IKU permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini berkat upaya sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh PPN Brondong terhadap nelayan.

IKU 11. Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat–daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)

Indikator ini merupakan indikator yang menghitung jumlah Capaian persentase Penyampaian informasi perizinan pusat–daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat–daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	0	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU persentase penyampaian informasi perizinan pusat–daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong telah tercapai 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dari DIPA PPN Brondong dan dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan evaluasi pengelolaan izin pusat dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3.1.6. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator yakni :

- 1) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)

- 2) IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks)
- 3) Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)
- 4) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)

IKU 12. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)

WBBM adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBBM > 75,07.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	-	75,07	86,84	115,68

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020 adalah sebesar 86,84 dengan capaian 115,68% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,07. Pada tahun 2019 tidak ada indikator capaian ini. TerCapainya indikator tersebut disebabkan karena dokumen-dokumen sudah terpenuhi dan adaya dukungan dari semua pegawai yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan WBK. Kerberhasilan ini berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan peningkatan kinerja pegawai. Kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM ini didukung oleh anggaran Kegiatan WBK sebesar Rp. 2.725.000,- dan kegiatan konsultasi pubik dalam rangka WBK sebesar Rp.

32.275.000,- atau jika di total sebesar Rp. 35.000.000,- dengan keterlibatan seluruh pegawai dalam rangka terCapainya IKU ini.

IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni :

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan pendidikan S3.
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi ; diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar / workshop / konferensi / setara.
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja ASN meliputi ; Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.
4. Disiplin pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi ; tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman (ringan, sedang, berat).

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	80	72	67,79	94,15

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020 adalah sebesar 67,79 dengan capaian 94,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar 72. Capaian indikator ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 80. IP ASN belum tercapai dikarenakan dari pegawai PPN Brondong banyak yang belum mendapatkan sertifikat yang mencantumkan jam pelajaran dalam sertifikat tersebut. Upaya yang dilakukan menyampaikan saran ke pihak terkait agar kedepannya setiap kegiatan yang bersertifikat agar mencantumkan jam pelajaran serta menginstruksikan ke semua pegawai untuk lebih aktif mengikuti kegiatan seminar, workshop dan sejenisnya.

IKU 14. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Brondong (nilai)

AKIP yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Nilai AKIP PPN Brondong adalah ukuran perkembangan implementasi SAKIP di PPN Brondong. Nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap 5 (lima) komponen SAKIP di PPN Brondong yang meliputi ; (i) Perencanaan kinerja, (ii) Pengukuran kinerja, (iii) Pelaporan kinerja, (iv) Evaluasi kinerja dan (v) Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Brondong Tahun 2020 dibandingkan Capaian 2019

Satuan : ton

Nama IKU	Capaian 2019	Target 2020	Realisi 2020	% Capaian
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Brondong	0	85	87,78	103,27

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian IKU Nilai PM SAKIP yaitu sebesar 103,27% dengan realisasi sebesar 87,78 dari target yang ditetapkan yaitu 85. Adapaun terCapainya realisasi IKU Nilai PM SAKIP ini karena dokumen-dokumen terkait SAKIP sudah terpenuhi dan adaya dukungan dari semua pegawai yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan terkait SAKIP.

IKU 15. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Nusantara Brondong (nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Lembaga. Kemudian Permenkeu ini diturunkan dalam Perdirjen Anggaran Nomor 1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran tanggal 29 Juni 2018. Perdirjen ini menggantikan perdirjen sebelumnya nomor 2/AG/2017. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimaksud difasilitasi melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan tolak ukur kinerja pelaksanaan anggaran yang memperhatikan beberapa komponen seperti Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran (Bobot Perhitungan 15%); Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (45%); Kepatuhan Terhadap Regulasi (30%), Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (10%)

Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;

- b. Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- d. Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;

Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Tujuan perdirjen Ini antara lain untuk :

- 1) Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL
- 2) Memberikan pedoman dalam melaksanakan analisis kinerja anggaran melalui kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KI dan
- 3) Menjadi rekomendasi atau masukan sebagai bahan pertimbangan pada penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Nusantara Brondong Tahun 2020

No	Triwulan	Nilai Kinerja
1	Pertama (Maret)	78,85
2	Kedua (Juni)	82,53
3	Ketiga (September)	99,29
4	Keempat (Ddesember)	99,38

Tabel 14. Matriks Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT PPN Brondong Tahun 2020

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	
				Capaian Kinerja	% Capaian
16	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	91,94	88	99,38	112,93

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian nilai kinerja anggaran UPT PPN Brondong pada tahun 2020 yaitu 99,38 dengan capaian 112,93%, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada 2020. Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2020 juga lebih tinggi dari capaian periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 91,94. Penyebab meningkatnya capaian kinerja anggaran pada periode ini adalah karena kondisi wabah global Covid-19 yang menurun di Lamongan, dan meningkatnya aktifitas perkantoran maupun aktivitas perikanan dan pengembangan / peningkatan fasilitas pelabuhan sehingga penyerapan anggaran meningkat.

Tindakan yang di lakukan demi mendukung capaian nilai kinerja anggaran UPT. PPN Brondong yaitu dengan melaksanakan seluruh program kegiatan pelabuhan tahun 2020. Kegiatan indikator ini didukung oleh seluruh pegawai PPN Brondong dengan total anggaran sebesar Rp. 12.104.445.000,-.





BAB IV PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk terCapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari 15 indikator yang sudah terukur tersebut sudah mencapai target 100 persen yakni sebagai berikut :

1. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan) sebesar 60 atau 100 % dari target sebesar 60.;
2. Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta) sebesar Rp. 1.015,06,- atau 145 % dari target sebesar Rp. 700;
3. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit) sebesar 209 kapal atau 261,25 % dari target sebesar 80;
4. Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) sebesar 100%. atau 100 % dari target sebesar 100;
5. Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP) sebesar 1 WPP atau 100 % dari target sebesar 1;
6. Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton) sebesar 55.358,89 ton atau 116,66 % dari target sebesar 47.452;
7. Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi) sebesar 1 atau 100 % dari target sebesar 1;
8. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) sebesar 85,35 % atau 106,69 % dari target sebesar 80;

9. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang) sebesar 20 atau 100 % dari target sebesar 20;
10. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi) sebesar 1 atau 100 % dari target sebesar 1;
11. Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) sebesar 1 atau 100 % dari target sebesar 1;
12. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) sebesar 86,84 atau 115,68 % dari target sebesar 75,07;
13. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) sebesar 87,78 atau 103,27 % dari target sebesar 85;
14. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) atau sebesar 99,38 atau 112,93 % dari target sebesar 88.

Adapun indikator Kinerja yang tidak tercapai targetnya adalah :

1. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks) sebesar 67,79 dari target sebesar 72.